



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENGEMBANGAN SENI PERTUNJUKAN, PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 2.10.2/UN32.2/KS/2024,
NOMOR: 03.10/X.FBS-UPMI/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 2, bulan Oktober tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si.** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. I Made Sujaya, S.S., M.Hum.** : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Seroja No. 57 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) IKIP PGRI

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Bali dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 915/M/2020 tentang Izin Perubahan Nama Universitas Mahadewa Indonesia IKIP PGRI Bali, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bidang Pendidikan, antara lain :
 - a. Program Merdeka belajar kampus Merdeka berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang misalnya pertukaran mahasiswa merdeka selama satu semester.
 - b. Kolaborasi teaching untuk mendukung program merdeka belajar kampus merdeka.
 - c. Forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra dan budaya serta ilmu perpustakaan dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, *assesment*, dan atau kegiatan lainnyadi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Bidang Penelitian antara lain:
 - a. Kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang bahasa, sastra dan budaya serta ilmu kepustakaan dan literasi.
 - b. Kolaborasi *writing*, baik artikel maupun buku referensi, modul ajar.
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat antara lain :
Program pengabdian kepada masyarakat Departemen seni dan Desain, dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, *assesment*.
- (4) Transfer hasil/produk pengembangan kreatifitas dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) penelitaian dan/atau pengabdian kepada masyarakat bidang seni tari, musik dan drama.
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, serta mendukung sinergitas potensi sumber daya manusia secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - b. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - c. Prodi Ilmu Perpustakaan Departemen Sastra Indonesia
 - d. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Departemen Sastra Inggris
 - e. Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Departemen Seni dan Desain
 - f. Prodi Pendidikan Seni Rupa Departemen Seni dan Desain
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan yang mendukung program merdeka belajar kampus merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan jadwal pelaksanaan program kegiatan dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 60 (enam puluh) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**

Pasal 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus

Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;

- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada :
Dr. Kusubakti Andajani M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dr. Kusubakti Andajani M.Pd
Wakil Dekan III Fakultas sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551912
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Wakil Dekan Fakultas Bahada dan Seni
Dr. Ni Luh Gede Liswahyuningsih, SS., M.Hum
Alamat : Jl. Seroja no 57 Denpasar, Bali
Telepon : 087861306788
Surel : info@mahadewa.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.


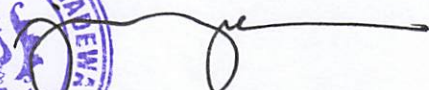
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

<p>PIHAK KESATU Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang</p>  <p>Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si. NIP 19711111999031002</p>	<p>PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia</p>  <p>Dr. I Made Sujaya S.S., M.Hum. NIDN 0810088001</p>
---	--